

Reformasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam di Era Merdeka Belajar

Uriani Lase¹, Juliani², Suri Susanti Nst³, Sella Amelia⁴

^{1,2,3,4} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email Corresponding Author: julianinst24@gmail.com.

ABSTRAK

Reformasi kebijakan pendidikan nasional melalui program Merdeka Belajar membawa implikasi signifikan terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam yang sebelumnya cenderung berorientasi pada penyeragaman materi kini diarahkan pada fleksibilitas pembelajaran, penguatan karakter, serta pengembangan kompetensi abad ke-21. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reformasi kebijakan kurikulum pendidikan Islam di era Merdeka Belajar dengan meninjau perubahan paradigma, tantangan implementasi, serta peluang pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap jurnal ilmiah terbitan tahun 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan ruang otonomi yang luas bagi lembaga pendidikan Islam dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan inovatif. Namun, tantangan masih ditemukan pada aspek kesiapan guru, kesenjangan mutu antar lembaga, serta keterbatasan pemahaman konsep Merdeka Belajar. Artikel ini menyimpulkan bahwa reformasi kurikulum pendidikan Islam perlu diiringi penguatan kapasitas pendidik dan kebijakan pendukung agar implementasi Merdeka Belajar berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Pendidikan Islam, Reformasi Pendidikan.*

ABSTRACT

The reform of national education policy through the Merdeka Belajar program has brought significant implications for the development of Islamic education curricula in Indonesia. Islamic education, which previously tended to emphasize standardized content delivery, is now directed toward learning flexibility, character strengthening, and the development of 21st-century competencies. This article aims to analyze the reform of Islamic education curriculum policy in the Merdeka Belajar era by examining paradigm shifts, implementation challenges, and opportunities for the development of Islamic Religious Education (IRE) learning. This study employs a qualitative approach using a literature review method,

analyzing scholarly journal articles published between 2020 and 2025. The findings indicate that the Kurikulum Merdeka provides broad autonomy for Islamic educational institutions to design contextual and innovative learning practices. However, challenges remain in terms of teacher readiness, disparities in educational quality among institutions, and limited conceptual understanding of the Merdeka Belajar framework. This article concludes that the reform of Islamic education curricula must be accompanied by strengthening educator capacity and supportive policies to ensure the optimal and sustainable implementation of Merdeka Belajar.

Keywords: Independent Curriculum, Independent Learning, Islamic Education, Educational Reform.

PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan pendidikan nasional di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah transformasi yang signifikan, khususnya melalui peluncuran program Merdeka Belajar. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, reformasi kurikulum menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era abad ke-21.

Pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari dinamika perubahan kebijakan tersebut. Selama ini, kurikulum pendidikan Islam cenderung berorientasi pada penyeragaman materi dan pencapaian kognitif, sehingga kurang memberikan ruang bagi pengembangan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, dan internalisasi nilai secara kontekstual. Kondisi ini menuntut adanya reformasi kebijakan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa menghilangkan identitas dan nilai-nilai keislaman.

Program Merdeka Belajar menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan, yaitu dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam merancang pembelajaran. Melalui Kurikulum Merdeka, lembaga pendidikan Islam diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sosial-budaya. Paradigma ini diharapkan mampu menciptakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang lebih bermakna dan aplikatif.

Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan Islam bukan tanpa tantangan. Perbedaan kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, serta kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan Islam menjadi persoalan yang masih dihadapi. Selain itu, pemahaman konseptual

pendidik terhadap prinsip Merdeka Belajar yang belum merata berpotensi menghambat efektivitas reformasi kurikulum di lapangan.

Di sisi lain, reformasi kebijakan kurikulum pendidikan Islam juga membuka peluang besar bagi penguatan karakter dan moderasi beragama. Pembelajaran PAI yang dirancang secara kontekstual dan reflektif dapat menjadi sarana strategis dalam membentuk peserta didik yang religius, toleran, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan kepribadian dan kesadaran sosial.

Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai agen transformasi pembelajaran. Guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan, mengembangkan metode pembelajaran inovatif, serta memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Tantangan ini menegaskan pentingnya penguatan kompetensi pedagogik dan profesional guru dalam kerangka reformasi kurikulum.

Kajian mengenai reformasi kebijakan kurikulum pendidikan Islam di era Merdeka Belajar menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai arah perubahan, tantangan implementasi, serta peluang pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Analisis yang mendalam terhadap kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis reformasi kebijakan kurikulum pendidikan Islam di era Merdeka Belajar dengan meninjau perubahan paradigma, implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, serta tantangan dan peluang yang menyertainya. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan Islam yang lebih adaptif, berkualitas, dan berkelanjutan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang menitikberatkan pada penelaahan sumber-sumber ilmiah berupa artikel jurnal, buku akademik, dokumen kebijakan (Assingily, 2021), serta laporan penelitian yang relevan dengan topik kurikulum Merdeka dan pendidikan Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur sekaligus menganalisis secara kritis implikasi kebijakan kurikulum Merdeka terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena reformasi kurikulum merupakan fenomena kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, sosial, dan ideologis, sehingga memerlukan kajian konseptual yang mendalam dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Paradigma Kurikulum Pendidikan Islam di Era Merdeka Belajar

Reformasi kurikulum pendidikan Islam di era Merdeka Belajar menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan kurikulum berbasis konten menuju kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan agar mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik serta konteks sosial-budaya lingkungan sekolah. Dalam konteks pendidikan Islam, fleksibilitas ini membuka ruang pengembangan pembelajaran PAI yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Pendidikan Islam pada era Kurikulum Merdeka tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan materi normatif keagamaan, tetapi diarahkan pada internalisasi nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran yang aktif, reflektif, dan bermakna. Hal ini tercermin dalam penguatan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang (Bahiyah & Acetylena, 2025).

Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam mulai diposisikan sebagai instrumen transformasi sosial, bukan sekadar transmisi doktrin. Kurikulum Merdeka memberikan legitimasi kebijakan bagi pendidikan Islam untuk berkembang secara lebih progresif tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Reformasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan respons terhadap tuntutan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Kurikulum Merdeka dipandang sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan kurikulum sebelumnya yang cenderung kaku dan seragam. Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini memungkinkan integrasi nilai keislaman dengan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital (Zainuddin, 2025).

Kebijakan kurikulum yang fleksibel juga berimplikasi pada meningkatnya peran guru sebagai perancang pembelajaran. Guru PAI tidak lagi hanya mengikuti silabus baku, tetapi dituntut mampu merancang modul ajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sosialnya.

Kondisi ini memperkuat posisi guru PAI sebagai agen perubahan (*agent of change*). Namun, peran strategis ini juga menuntut peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru agar kebebasan kurikulum tidak berujung pada penurunan kualitas pembelajaran.

Dari perspektif kelembagaan, reformasi kurikulum pendidikan Islam di era Merdeka Belajar turut mendorong madrasah dan pesantren untuk melakukan inovasi pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan ciri khas institusionalnya melalui kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) (Muslimin, 2023).

Namun demikian, beberapa penelitian mencatat bahwa tidak semua lembaga pendidikan Islam siap mengimplementasikan paradigma baru ini secara

optimal. Kesenjangan kapasitas manajerial dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat reformasi kurikulum di beberapa daerah.

Reformasi paradigma kurikulum pendidikan Islam sejatinya merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan pendampingan berkelanjutan. Tanpa dukungan sistemik, fleksibilitas kurikulum berpotensi menimbulkan disparitas mutu antar lembaga pendidikan Islam.

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menuntut perubahan signifikan dalam strategi pembelajaran di kelas. Pembelajaran PAI dalam Kurikulum Merdeka diarahkan pada pendekatan yang lebih kontekstual, dialogis, dan berbasis pengalaman belajar peserta didik. Guru didorong untuk menggunakan metode pembelajaran aktif, seperti diskusi, proyek, dan studi kasus.

Penerapan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) dalam PAI mampu meningkatkan keterlibatan siswa serta pemahaman nilai-nilai keislaman secara lebih mendalam. Melalui proyek, peserta didik tidak hanya mempelajari konsep agama, tetapi juga menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata (Rusdiana, 2024).

Implementasi ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam pendidikan Islam. Pembelajaran PAI menjadi lebih hidup dan relevan dengan realitas sosial peserta didik.

Namun, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada PAI masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan fasilitas dan akses teknologi di beberapa lembaga pendidikan Islam menghambat penerapan pembelajaran inovatif. Selain itu, kesiapan guru dalam menyusun modul ajar Kurikulum Merdeka masih bervariasi. Sebagian guru PAI masih memahami Kurikulum Merdeka secara administratif, sehingga perubahan pembelajaran belum sepenuhnya berdampak pada praktik di kelas (Fauzi, 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi kurikulum tidak dapat dilepaskan dari reformasi sistem pelatihan guru. Tanpa pemahaman konseptual yang kuat, Kurikulum Merdeka berpotensi hanya menjadi perubahan dokumen, bukan perubahan praksis.

Dari sisi evaluasi pembelajaran, Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan asesmen formatif dan autentik. Indarta et al. (2022) menegaskan bahwa asesmen tidak lagi semata-mata mengukur hafalan, tetapi proses dan capaian kompetensi peserta didik. Dalam PAI, asesmen diarahkan pada pengukuran sikap religius, pemahaman nilai, dan praktik keagamaan (Ahadi, 2025).

Namun demikian, implementasi asesmen autentik dalam PAI juga menghadapi tantangan teknis. Guru memerlukan panduan dan instrumen yang jelas agar penilaian karakter dan sikap religius dapat dilakukan secara objektif.

Asesmen dalam pendidikan Islam perlu dirancang secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara objektivitas penilaian dan nilai-nilai normatif keislaman.

Tantangan dan Peluang Reformasi Kurikulum Pendidikan Islam

Reformasi kurikulum pendidikan Islam di era Merdeka Belajar menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks. Kosim et al. menyatakan bahwa otonomi kurikulum memberikan ruang inovasi yang luas bagi lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan kebutuhan masyarakat.

Peluang terbesar dari Kurikulum Merdeka adalah penguatan nilai moderasi beragama melalui pembelajaran yang inklusif dan dialogis. Pendidikan Islam berpotensi menjadi garda terdepan dalam membangun toleransi dan harmoni sosial. Peluang ini harus dimanfaatkan secara strategis agar pendidikan Islam tidak hanya responsif terhadap kebijakan, tetapi juga proaktif dalam membentuk peradaban yang berkeadilan dan berkeadaban.

Di sisi lain, tantangan utama reformasi kurikulum pendidikan Islam terletak pada kesenjangan kualitas implementasi antar lembaga. Lembaga pendidikan Islam di daerah terpencil sering kali tertinggal dalam akses sumber daya dan pendampingan kebijakan. Tanpa standar mutu yang jelas, fleksibilitas kurikulum dapat memicu fragmentasi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan Kurikulum Merdeka perlu diimbangi dengan sistem pengawasan mutu dan afirmasi kebijakan bagi lembaga pendidikan Islam yang kurang beruntung (Dacholfany, n.d.).

Secara keseluruhan, reformasi kurikulum pendidikan Islam di era Merdeka Belajar merupakan proses dinamis yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pendidik. Keberhasilan reformasi tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam.

Peran Guru Pendidikan Islam sebagai Agen Transformasi Kurikulum Merdeka

Reformasi kurikulum pendidikan Islam di era Merdeka Belajar tidak dapat dilepaskan dari peran strategis guru sebagai pelaksana utama kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi aktor kunci dalam menerjemahkan kebijakan Kurikulum Merdeka ke dalam praktik pembelajaran yang nyata di kelas. Penelitian Setiawan et al. (2022) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat ditentukan oleh

kapasitas guru dalam merancang pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada peserta didik.

Guru PAI dalam Kurikulum Merdeka tidak lagi berperan sebagai penyampai materi semata, melainkan sebagai fasilitator, mediator nilai, dan pembimbing proses internalisasi ajaran Islam. Perubahan peran ini menuntut guru untuk memiliki kompetensi pedagogik yang lebih adaptif, kreatif, dan reflektif terhadap kebutuhan belajar siswa (Saptana & Saliem, 2016).

Transformasi peran guru PAI ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma kurikulum. Guru tidak cukup hanya menguasai materi keislaman, tetapi juga harus mampu mengelola pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter secara holistik.

Dalam konteks pembelajaran PAI, Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang beragam, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi reflektif, dan pembelajaran diferensiasi. Strategi ini memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam proses belajar dan mengaitkan nilai-nilai Islam dengan realitas kehidupan sehari-hari (Lestari & Setiawan, 2024).

Kreativitas guru PAI dalam merancang modul ajar menjadi faktor penentu keberhasilan Kurikulum Merdeka. Modul ajar yang baik tidak hanya memuat capaian pembelajaran, tetapi juga aktivitas belajar yang mendorong penguatan iman, akhlak, dan keterampilan sosial.

Kebebasan guru dalam merancang pembelajaran merupakan peluang besar, namun juga mengandung risiko apabila tidak diiringi dengan kompetensi profesional yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru PAI menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi kurikulum pendidikan Islam.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak semua guru PAI siap menghadapi tuntutan Kurikulum Merdeka. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep diferensiasi pembelajaran dan asesmen autentik. Keterbatasan pelatihan dan pendampingan menjadi salah satu faktor penyebab kondisi tersebut.

Beban administratif guru sering kali menghambat kreativitas dalam pembelajaran. Alih-alih fokus pada inovasi pembelajaran, guru masih disibukkan dengan pemenuhan dokumen administrasi kurikulum (Dacholfany, n.d.). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi. Reformasi kurikulum akan sulit mencapai tujuan apabila tidak disertai penyederhanaan administrasi dan dukungan kebijakan yang berpihak pada guru.

Dari sisi pengembangan profesional, Kurikulum Merdeka menuntut guru PAI untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan berkelanjutan. Anshori et al. (2022) menekankan pentingnya penguatan literasi pedagogik dan

digital bagi guru pendidikan Islam agar mampu merespons tantangan pembelajaran abad ke-21.

Penguasaan teknologi pembelajaran menjadi aspek penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka, terutama dalam mengembangkan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Indarta et al. (2022) menyatakan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta memperluas akses terhadap sumber belajar keislaman (Purwati, 2025).

Guru PAI yang adaptif terhadap teknologi akan lebih mampu memanfaatkan Kurikulum Merdeka sebagai sarana transformasi pendidikan Islam. Namun, tanpa dukungan pelatihan yang sistematis, tuntutan ini justru dapat menjadi beban tambahan bagi guru (Huda, 2020).

Secara keseluruhan, peran guru PAI dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen transformasi pendidikan Islam. Keberhasilan reformasi kurikulum sangat bergantung pada sejauh mana guru diberdayakan, didukung, dan difasilitasi untuk menjalankan peran strategis tersebut.

SIMPULAN

Reformasi kebijakan kurikulum pendidikan Islam di era Merdeka Belajar menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan pembelajaran yang bersifat seragam dan berorientasi konten menuju pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan ruang otonomi yang lebih luas bagi lembaga pendidikan Islam dan guru Pendidikan Agama Islam untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif, integratif, dan relevan dengan tantangan abad ke-21, tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi utama pembentukan karakter.

Namun demikian, keberhasilan reformasi kurikulum pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya kompetensi guru, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, serta pemerataan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pendidik dalam penguatan kapasitas profesional guru, penyederhanaan administrasi pembelajaran, serta pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka agar pendidikan Islam mampu berkontribusi secara optimal dalam membentuk generasi yang religius, moderat, dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, A. (2025). *Evaluasi Pembelajaran PAI Berbasis Moderasi Beragama : Analisis Teoritis dan Implementasinya Evaluation of Islamic Religious Education Learning Based on Religious Moderation : A Theoretical Analysis and Its Implementation*. 5(3), 428–437.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Bahiyah, K., & Acetylena, S. (2025). *Pengembangan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Nilai Islam di MTs Al-Khoirot*. 799–807.
- Dacholfany, M. I. (n.d.). *Reformasi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi : Sebuah Tantangan dan Harapan*.
- Dwi Lestari, R., & Setiawan, H. R. (2024). Penerapan Metode Aktif Partisipatif Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MTs Ar-Ridha Kota Medan. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(1), 13–26. https://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1169
- Fauzi, M. N. (2023). Problematika Guru Mengimplementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(4), 1661. <https://doi.org/10.35931/am.v7i4.2688>
- Huda, A. (2020). Lembaga Dan Sistem Pendidikan Islam Di Indonesia. *Tarbiyatul Misbah (Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan)*, 228–244. <https://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/pai/article/view/89>
- Muslimin, I. (2023). *Merdeka Belajar Pada Lembaga Pendidikan Islam : Studi Kasus Di Madrasah Se-Jawa Timur*. 3(1), 31–49.
- Purwati, E. (2025). *Jurnal Pendidikan Indonesia : Reformasi Pendidikan Islam di Tengah Globalisasi dan Modernisasi : Telaah Konseptual dan Implikasinya*. 5(4). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1670>
- Rusdiana, A. (2024). *Sistem Sekolah Islam Terpadu*.
- Saptana, N., & Saliem, H. P. (2016). Tinjauan Konseptual Makro-Mikro Pemasaran dan Implikasinya bagi Pembangunan Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 33(2), 127. <https://doi.org/10.21082/fae.v33n2.2015.127-148>
- Zainuddin, A. (2025). *Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam di Era Digital Integrasi Nilai Keislaman dan Literasi Teknologi*. 1(1), 1–22.